

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Achamd Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jogjakarta: Kanisius.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Univeristas Hasanuddin.
- Asmuni, M.Th, 2007, *Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani
- G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta : Erlangga.
- H. Suparman Usman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Pres.
- Habib adji, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Reflika Aditama.
- Hari Purwadi, 2004, *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Harapan.
- Kamal Hidjaz. 2010, Efektivitas penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Makassar: Pustaka Refleksi.
- M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: P.T Bina Ilmu,
- Philups M. Hadjon, 1992, *Pemerintah Menurut Hukum*, Surabaya: Yuridika.

- Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rachamdi Usman, 2013, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara* : Edisi revisi, Cetakan ke -9, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan HR (II). 2013, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rozalinda, M.Ag, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta Binacipta.
- Sajipto Rahardjo, 2007, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti,
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Edisi Baru, Cetakan kelima*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi, 2018, *Wakaf dan Pemberdayaan umat*, Jakarta, Sinar Grafika
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggungjawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-segi teoritik dan yuridis pertanggungjawaban Kekuasaan*, Jakarta : Universitas Airlangga.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba serbi Praktek Notariat*, Buku 1 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Cetakan ke empat belas, Yogyakarta : Kanisius.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Suhairi, 2017, *Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)* Jurnal TAPIS, Vol. 01, No. 01, Institut Agama Islam Negeri Metro
- Sefli Suharman dan Fauzie Yusuf Hasibuan, 2016, *Kepastian Hukum Kewenangan Nazhir: Ruislag Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Bisnis Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 1 Nomor 2*, Universitas Jayabaya
- Aisyah Ayu Musyafah, Islamiyati, Muhyidin, Achmad Zulfa Andikatama, 2023 *Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia*, Jurnal

- Yose Leonando, 2019, *Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*, Jurnal Hukum Islam Alhurriyah Volume 04 Nomor 02, Universitas Andalas,
- Tim Hukum Online, 2022, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*”, Hukum Online.com, Edisi Tanggal 30 September 2022
- Hetty Hasanah, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenitas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, Artikel diakses pada
- Samsidar, ‘Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan’ (2016) 11 Jurnal Supremasi 138
- Imam Wahyu Jati, ‘Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf’ (2024) 4 Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 89.
- Susie Evidia Yuvidianti, ‘Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Benda Bergerak / Susie Evidia Yuvidianti’.
- Hasrul Sri Kustiyah, ‘Politik Hukum Pemberian Kewenangan Kepada Notaris Untuk Membuat Akta Pertanahan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan PPAT’ (2018) 5 Jurnal Akta 309.
- Moh Gandara, ‘Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat’ (2020) 2 Khazanah Hukum 92.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi:

- Lalu Rizky Rachmatullah, 2020, *Prinsip Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf*, Tesis Universitas Jember.
- Risjab Salim, 2017, *Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

D. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
3. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf;